



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1. Tentang Perusahaan**

Wilayah Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan yang diapit di antara Asia dan Australia, serta terbentang diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Membuat Indonesia berada diantara pertemuan tiga lempeng tektonik yang aktif yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik (*Ring of Fire*). Dengan potensi bahaya yang besar ditambah Indonesia yang termasuk kedalam iklim Tropis, menghasilkan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti tanah longsor, banjir rob, cuaca ekstrim, kekeringan dan angin puting beliung. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membentuk badan yang dapat melaksanakan tugas dalam hal penanggulangan bencana. (BNPB, 2021)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga non-Kementerian dibawah naungan pemerintah Indonesia. Dengan tujuan melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal penanggulangan bencana, evakuasi, dan rehabilitasi kepada daerah terdampak. Namun, jauh sebelum lembaga ini bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang lebih dikenal BNPB. Lembaga ini mengalami beberapa pergantian nama dan tugas. Berikut periode waktu dari badan yang telah hadir sejak Indonesia merdeka tahun 1945:

##### **1. 1945 – 1966 BPKKP**

Pada awal berdirinya Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Korban Perang (BPKKP) pada 20 Agustus 1945. Pembentukan badan ini bertujuan untuk menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)

##### **2. 1966 – 1967 BP2BAP**

Melalui Surat Keputusan Presiden No 256 Tahun 1966 badan ini berganti nama menjadi Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat

(BP2BAP) dibawah tanggung jawab Menteri Sosial pada saat itu. Kala itu penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada bencana yang terjadi akibat ulah manusia tapi juga yang terjadi akibat fenomena alam. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021).

### **3. 1967 – 1979 TKP2BA**

Semakin tingginya fenomena-fenomena alam yang berujung pada bencana, mendorong Presidium Kabinet di tahun 1967 melalui Keputusan 14/U/KEP/I/1967 dibentuklah Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA), (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021).

### **4. 1979 – 1990 Bakornas PBA**

Pada periode ini TKP2BA ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA), dikepalai oleh Menkokesra melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979. Dengan tugas mencakup tahap pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi. Untuk memudahkan koordinasi di lapangan Menteri Dalam negeri mengeluarkan instruksi No 27 Tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) di setiap Provinsi, (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021).

### **5. 1990 – 2000 Bakornas PB**

Kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi dan konflik sosial memicu terjadi pergeseran paradigma penanggulangan bencana yang terjadi pada periode ini. Maka mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan Presiden No 43 Tahun 1990, dengan akupan tugas yang lebih luas dan tidak berfokus pada bencana. Tetapi pada bencana non-alam dan sosial.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

## 6. 2000 – 2005 Bakornas PBP

Bencana sosial yang terjadi pada era ini, memunculkan banyak permasalahan baru di banyak tempat yang berujung pada terciptanya banyak sudut pandang baru tentang kelompok / masyarakat atau disebut multidimensi membuat pemerintah akhirnya. Mengeluarkan Keputusan Presiden No 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden No 111 Tahun 2001. Bakornas PB resmi bertransformasi menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP). (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)

## 7. 2005 – Sekarang BNPB

Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 di Aceh. Membuat banyak pihak memberikan perhatian serius tentang penanggulangan bencana yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pada titik inilah pemerintah melalui lembaga Bakornas PBP bertransformasi menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dimana kemudian pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan No 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021).



(sumber Web BNPB, 2021.)

**Gambar 2.1** Logo Badan Penanggulangan Bencana.

Logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara menyeluruh melambangkan Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana. Warna biru pada bagian tengah perisai melambangkan misi BNPB dalam melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui penanggulangan resiko, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal dan sebagai penyelenggara penanguhan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana , 2021)

## **2.2. Visi Misi Perusahaan**

### **2.2.1. Visi**

Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021).

### **2.2.2. Misi**

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional.
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien

UMMN

UNIVERSITAS

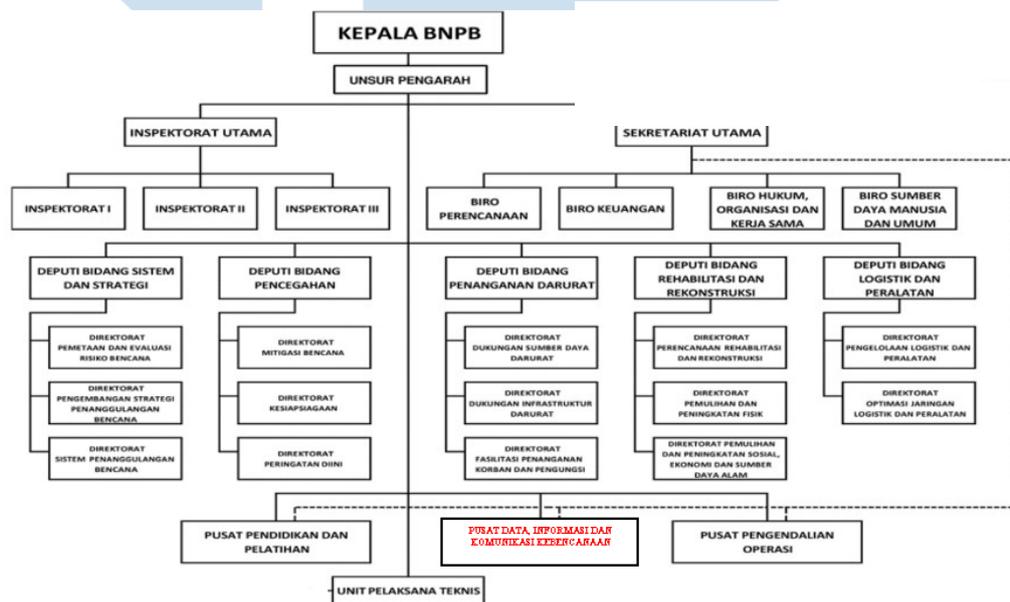
MULTIMEDIA

NUSANTARA

3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana.
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)

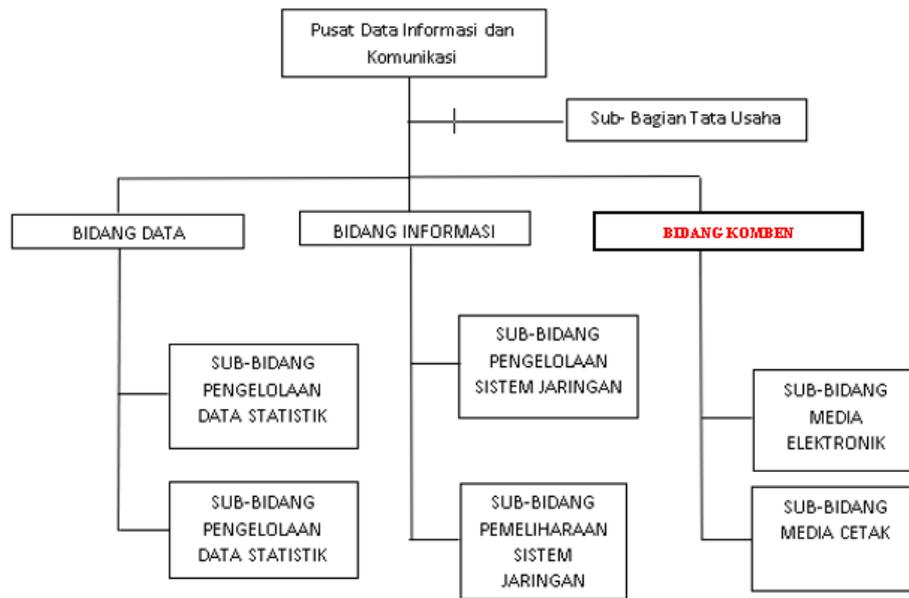
### 2.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut struktur organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, struktur organisasi Pusat Data Informasi dan Komunikasi, dan Bidang Komunikasi Kebencanaan, tempat penulis melakukan praktik kerja magang. Dapat dilihat pada **Bagan 2.2**, **Bagan 2.3**, dan **Bagan 2.4**



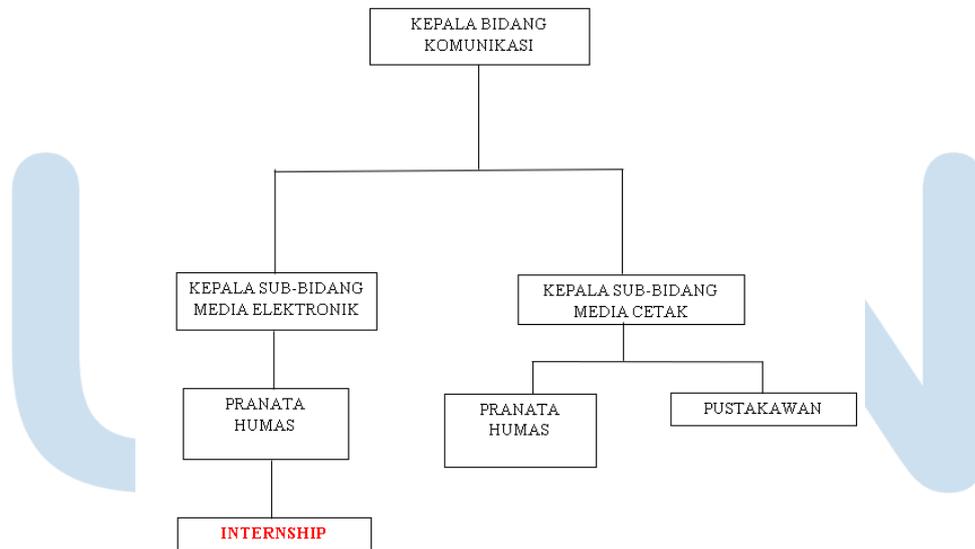
(sumber Web BNPB, 2021)

**Bagan 2.1** Struktur Organisasi BNPB.



(Sumber Web BNPB, 2021.)

**Bagan 2.2** Bagan Struktur Organisasi Pusat Data Informasi dan Komunikasi.



(Sumber Data Internal Bidang Komunikasi Bencana, 2021.)

**Bagan 2.3** Struktur Organisasi Komunikasi Bencana (Komben).

## **2.4. Ruang Lingkup Kerja**

### **1. Pusdalops**

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), memiliki 3 tugas pokok yaitu:

- a) Pra Bencana: pengumpul, mengelola dan menyajikan data dan informasi kebencanaan secara berkala.
- b) Tanggap Darurat: mendirikan posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat di daerah terdampak.
- c) Pasca Bencana: menyediakan data dan informasi, terutama dalam pelaksanaan proses rekonstruksi atau rehabilitasi pada daerah terdampak. Pusdalops tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dibawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang biasa disebut dengan Pusdalops PB. Data yang diberikan Pusdalops PB akan diteruskan kepada Pusdalops di BNPB untuk selanjutnya diberikan kepada bidang Komen.

### **2. Komunikasi Kebencanaan**

Komunikasi Kebencanaan, yang akan diolah menjadi informasi publik berupa siaran pers dalam bentuk digital ataupun cetak. bidang ini merupakan tempat dimana penulis melakukan praktik magang bidang ini bertanggung jawab atas rilis berita atau sebagai agen pers dan memberikan informasi publik. Selain itu tugas lainnya seperti pendampingan terhadap tamu diorana.

### **3. Teknologi Jaringan**

Sub-divisi ini bertugas untuk menjamin keamanan aset milik BNPB yang berhubungan dengan teknologi dan jaringan

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A